Penyuluhan Hukum Pembuatan Akta oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Anthony Robert Phangestu Abady¹, Mella Ismelina Farma Rahayu²

^{1,2} Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S. Parman No. 1, RT 3/RW 8, Tomang, Kec. Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta
anthonyrobert2023@gmail.com

Abstract

Notary is a public official who has the authority to make authentic deeds and has other authorities as referred to in Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary. Notary as a capital market supporting profession to be able to make authentic deeds, and carry out activities in the capital market sector must first be registered with the Financial Services Authority (OJK), meet the requirements, and fill out an application for registration of a notary as a capital market supporting profession in the attachment to the Financial Services Authority regulations (OJK) Number 67/POJK.04/2017 Concerning Notaries Conducting Activities in the Capital Market. According to Article 1868 of the Civil Code, an authentic deed is a deed which, in the form determined by law, is made by or before public officials who have the power to do so at the place where the deed was made. The Authority of a Notary in Providing Legal Counseling for Making Deeds Based on the Notary Office Act (UUJN), a notary must educate the public or the parties who will draw up a deed before a notary regarding the rights and obligations of each party.

Keywords: Authority, Legal Counseling, General Meeting of Shareholders, Capital Market

Abstrak

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal untuk dapat membuat akta autentik, dan melakukan kegiatan di bidang pasar modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memenuhi persyaratan, dan mengisi permohonan pendaftaran notaris sebagai profesi penunjang pasar modal dalam lampiran peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 67/POJK.04/2017 Tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal. Menurut Pasal 1868 KUHPerdara, Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Kewenangan Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Pembuatan Akta berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), seorang notaris harus mengedukasi masyarakat atau para pihak yang akan membuat akta dihadapan notaris terkait hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Kata Kunci: Kewenangan, Penyuluhan Hukum, Rapat Umum Pemegang Saham, Pasar Modal

Copyright (c) 2023 Anthony Robert Phangestu, Mella Ismelina Farma Rahayu

Corresponding author: Anthony Robert Phangestu

Email Address anthonyrobert2023@gmail.com (Jl. Letjen S. Parman No. 1, RT 3/RW 8, Tomang, Kec. Grogol petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta)

Received 06 January 2023, Accepted 16 January 2023, Published 25 January 2023

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan tambahan. Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal terlebih dahulu harus terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memenuhi persyaratan, dan mengisi permohonan pendaftaran notaris sebagai profesi penunjang pasar modal dalam lampiran peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 67 /POJK.04/2017 Tentang Notaris Yang

Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal. Untuk dapat membuat akta otentik dan melakukan kegiatan di bidang pasar modal, notaris harus didaftarkan.

Akta otentik adalah akta yang ditandatangani oleh atau di hadapan pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk itu di tempat akta itu ditandatangani, sebagaimana diatur undang-undang dalam Pasal 1868 KUH Perdata.

Perseroan Terbatas selanjutnya disebut "Perseroan" adalah badan hukum yang merupakan persekutuan permodalan, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham, dan memenuhi syarat-syarat yang digariskan dalam Undang-Undang yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Undang-Undang ini dan Tata Tertib Pelaksanaannya.

Perseroan Terbatas didirikan melalui perjanjian, yang diwujudkan sebagai perkumpulan orang-orang yang bersepakat untuk mendirikan perseroan terbatas sebagai badan usaha. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian tidak dapat dipisahkan dari pendirian Perseroan Terbatas karena penggunaan suatu perjanjian merupakan landasannya (Sari, 2018).

Apa yang disebut "*separate patrimony*", atau kepemilikan aset terpisah dari pemegang saham sebagai pemilik, adalah komponen utama dari badan hukum. Tanggung jawab terbatas pemegang saham perusahaan sebagai pemilik dan manajemen adalah karakteristik kedua dari badan hukum. Prinsip ini melindungi kekayaan perusahaan dari kreditur yang merupakan pemegang saham, sedangkan tanggung jawab terbatas melindungi kekayaan pemilik perusahaan, atau pemegang kekayaan perusahaan, dari tuntutan kreditur. Yang dimaksud dengan "tanggung jawab terbatas" adalah bahwa kekayaan pemegang saham dan pengurus Perseroan Terbatas adalah satu-satunya kekayaan yang dapat diklaim oleh kreditur. Pembatasan kewajiban pemilik dan direksi mengakui Organisasi Tanggung Jawab Terbatas dari berbagai jenis asosiasi perusahaan yang tidak berbadan hukum (Sari, 2018).

Pasal 7 ayat 1 UUPT menyatakan bahwa Perseroan Terbatas harus dibentuk oleh sekurang-kurangnya dua orang, baik melalui akta resmi maupun akta notaris yang ditandatangani oleh dua orang atau lebih, atau semata-mata melalui perjanjian antara dua orang atau lebih. Pendirian Perseroan sebagai badan hukum bersifat "contractual" (berdasarkan kontrak) dari sudut pandang hukum perjanjian, yang menyatakan bahwa pendirian suatu perusahaan adalah hasil dari perjanjian. Selain bersifat kontraktual, perjanjian untuk mengikat perjanjian mendirikan perseroan juga bersifat "konsensual" (Sari, 2018).

Apabila suami istri mendirikan Perseroan Terbatas tanpa terlebih dahulu mengadakan perjanjian perkawinan (pemisahan harta), tetap tidak memenuhi syarat sahnya pendirian perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT, yang menyatakan bahwa perusahaan harus didirikan oleh dua orang atau lebih. Dalam pembuatan kontrak-kontrak penting seperti Kontrak Investasi Kolektif (KIK), penjaminan kontrak, atau akta-akta penting seperti Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana, peran notaris sangat penting khususnya di bidang pasar modal. Kontrak penting tersebut meliputi emiten, perusahaan publik, perusahaan efek, dan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Jasa notaris sebagai profesi penunjang pasar modal juga diperlukan dalam kegiatan pasar modal untuk hal-hal seperti:

1. Melakukan pencatatan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan menyusun pernyataan hasil RUPS, baik sebelum maupun sesudah RUPS *go public*.
2. Menelaah keabsahan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan RUPS, misalnya kesesuaian dengan anggaran dasar organisasi, strategi pemanggilan RUPS dan kebenaran investor atau perantaranya untuk menghadiri RUPS.
3. Anggaran dasar yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat dipisahkan dari pemeriksaan perubahan pasal-pasal tersebut. Untuk melindungi investor dan masyarakat, bahkan perlu dilakukan perubahan anggaran dasar agar sejalan dan sesuai dengan peraturan pasar modal.

Akuntan Publik sebagai penunjang panggilan pasar modal diatur dalam Peraturan Nomor 8 Tahun 1995 tentang Bidang Usaha Modal dalam Pasal 64 ayat (1), dan untuk dapat melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal terlebih dahulu harus didaftarkan pada Bapepam. Menurut ayat (1) Pasal 15 UUP, penandatanganan akta umum merupakan salah satu kewenangan notaris. Menurut kutipan Tan Thong Kie dari Lubbers, notaris tidak hanya mencatatnya (dalam bentuk akta), tetapi juga mencatat dan memeliharanya. Ini berarti bahwa merekam saja tidak cukup; akta itu juga harus berguna dalam keadaan khusus.

Kewenangan ini disebut sebagai Kuasa Umum Notaris berdasarkan pengaturan ini, dengan batasan-batasan sebagai berikut:

1. Pejabat lain yang ditunjuk secara sah tidak dikecualikan;
2. Tentang akta-akta otentik yang berkenaan dengan segala perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh undang-undang atau dikehendaki oleh yang bersangkutan;
3. Tentang subjek hukum, disebut juga orang atau badan hukum untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau diinginkan oleh pihak yang berkepentingan;

Wewenang utama seorang notaris adalah melaksanakan akta-akta autentik. Pedoman untuk menentukan keaslian akta berdasarkan pada Pasal 1 angka 7 UUP, Akta yang selanjutnya disebut Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat menurut Undang-Undang ini oleh atau di hadapan Notaris.

Kewenangan khusus notaris untuk melakukan perbuatan hukum tertentu diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUP dan UUP. Perbuatan tersebut antara lain:

1. Mendaftarkan tanda tangan surat dalam buku khusus untuk memastikan keasliannya dan memastikan tanggal pasti surat itu;
2. Mendaftar secara khusus untuk mendapatkan dokumen pribadi;
3. Membuat salinan surat asli dengan tulisan tangan yang mencantumkan keterangan sebagaimana tertulis dan diuraikan dalam surat yang bersangkutan;
4. Pastikan fotokopi dan surat aslinya sesuai;
5. Memberikan nasihat hukum kepada orang tentang melakukan sesuatu;

6. Membuat akta yang berhubungan dengan tanah; atau
7. Membuat akta dari risalah lelang.

Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN P secara khusus menyebutkan bahwa Notaris berwenang memberikan nasihat hukum mengenai pembuatan akta. Hal ini menunjukkan bahwa keinginan penghadap dituangkan dalam suatu akta notaris dan notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan atau nasihat hukum mengenai ketentuan hukum atas perbuatan yang dimohonkan. Pembinaan hukum ini penting agar kegiatan yang dilakukan tidak mengabaikan pengaturan hukum dan perbuatan nyata.

Notaris berperan dalam kegiatan suatu perseroan (Perseroan Terbatas) sehubungan dengan kegiatan tersebut. Setiap Rapat Umum Pemegang Saham harus memuat risalah, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. RUPS tanpa risalah tidak dapat melaksanakan keputusan dan ketentuan yang dibuat dalam RUPS karena RUPS dianggap tidak pernah ada. Akta notaris yang juga dapat dibuat oleh notaris yang menghadiri kegiatan RUPS digunakan untuk mencatat risalah RUPS (atau RUPSLB), sehingga notaris dalam hal ini dapat membuktikan kebenaran akta dengan menyaksikan dan mendengar jalannya RUPS.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dan (2) dan Pasal 91 Peraturan Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, untuk setiap penyelenggaraan RUPS harus dibuat risalah RUPS dan disahkan oleh direktur RUPS. pertemuan dan semacamnya 1 (satu) investor yang ditunjuk dari dan oleh anggota RUPS. Jika risalah RUPS ditulis dengan akta notaris, tidak diperlukan tanda tangan. Di luar RUPS, pemegang saham juga dapat mengambil keputusan yang mengikat secara hukum jika semua pemegang saham dengan hak suara menandatangani usul yang bersangkutan dan menyetujuinya secara tertulis.

Saham adalah bukti penyertaan atau penyertaan modal. Individu, organisasi, dan bisnis adalah contoh subjek yang menyediakan modal. Mereka secara otomatis berinvestasi dalam bisnis itu begitu mereka memiliki saham. Keuntungan akan diperoleh jika perusahaan berkembang dan nilai sahamnya cenderung naik sepanjang tahun. Tapi jika terjadi penurunan, akan mendapatkan kerugian.

Masyarakat Indonesia paling mengenal saham sebagai pilihan investasi. Jika Anda membeli saham suatu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Anda menjadi pemegang saham perusahaan tersebut dan berhak atas dividen sesuai dengan jumlah saham yang Anda miliki. Terlepas dari hak atas keuntungan, individu tersebut juga dapat memperoleh keuntungan dari selisih harga jual penawaran. Ketika seseorang ingin mentransfer saham kepada orang lain ketika harga saham orang itu naik, fakta bahwa itu likuid dan mudah diperdagangkan jelas menguntungkan orang itu.

Jika dibandingkan dengan jenis investasi lainnya, investasi saham menawarkan keuntungan yang lebih tinggi. Namun, terlepas dari potensi pengembaliannya yang tinggi, berinvestasi di saham memiliki tingkat risiko yang tinggi karena sensitivitas harga yang ekstrem terhadap faktor ekonomi, politik, dan musiman. Pemegang saham berhak menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan likuidasi, serta menggunakan hak-hak lain berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sesuai

dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Bidang Usaha Modal, bidang Usaha Modal memperhatikan tentang penawaran umum dan Perdagangan efek, Organisasi Publik yang terkait dengan Efek yang dikeluarkannya, serta yayasan dan pemanggilan yang terkait dengan Efek. Surat pengakuan utang, surat berharga, saham, obligasi, bukti utang, Unit Penyertaan dalam kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap turunan Efek adalah contoh-contoh efek. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan suatu sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek dari pihak lain dalam rangka memperdagangkan efek. Informasi atau fakta penting dan relevan tentang peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek yang dicatatkan di Bursa Efek atau keputusan investor, calon investor, atau pihak lain yang berkepentingan dengan informasi atau fakta tersebut disebut sebagai informasi atau fakta material. Portofolio Efek suatu pihak adalah kumpulan efek. Pihak, di sisi lain, adalah organisasi, individu, bisnis, usaha patungan, dan asosiasi.

Agar tidak menjadi korban, investasi penipuan merupakan jenis investasi yang tidak memiliki izin atau skema yang jelas. Investasi penipuan adalah investasi di mana seseorang diminta untuk menginvestasikan sejumlah uang tertentu pada produk atau perusahaan yang tidak pernah ada. Uang akan diambil dari mereka yang memerintahkan perilaku ini. Akibatnya, Anda harus berhati-hati dan berhati-hati dalam perencanaan keuangan yang efektif agar tidak dihadapkan pada usaha palsu. Dalam melakukan investasi saham juga terdapat suatu permasalahan dimana pihak investor merasa dirugikan akibat berinvestasi kepada emiten yang menawarkan saham bodong, yang kemudian tidak mendapatkan keuntungan atau dalam hal ini merasa dirugikan, ada pihak yang merasa dirugikan dari pihak investor atas usaha untuk berinvestasi di perseroan tersebut, dan pihak emiten yang menikmati hasil uang yang telah disetor oleh pihak investor untuk tujuan pribadi, yang bersifat menyimpang secara hukum, tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, atau pihak emiten melakukan tindakan tersebut tanpa izin, dan memanfaatkan pihak investor yang tidak mengetahui penyimpangan tersebut, dan memanfaatkan celah kepada pihak investor terutama yang masih awam terhadap kebijakan yang mengatur investasi tersebut apakah aman atau tidak untuk membeli dan berinvestasi saham kepada pihak emiten yang melakukan penawaran umum tersebut, oleh karena itu peran notaris sebagai profesi penunjang pasar modal dirasa penting untuk memberikan penyuluhan hukum kepada pihak investor karena menurut Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dan untuk menganalisis serta menjawab semua permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti “Penyuluhan Hukum Pembuatan Akta Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris”.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis. Data penelitian ini bersumber dari data sekunder baik dari artikel, web, buku dan Undang-Undang. Kemudian data dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan yang relevan mengenai tema penelitian

HASIL DAN DISKUSI

Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)

Wewenang utama seorang notaris adalah melaksanakan akta-akta autentik. Pedoman untuk menentukan keaslian akta berdasarkan pada Pasal 1 angka 7 UUJN P, Akta yang selanjutnya disebut Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat menurut Undang-Undang ini oleh atau di hadapan Notaris. Oleh karena itu, Akuntan Publik diproklamirkan sebagai otoritas publik (*openbaar ambtenaar*). Menurut Pasal 1868 KUHPerdara, “Akta yang dibuat oleh notaris dalam kedudukannya mempunyai sifat otentik”. Akta otentik adalah akta yang bentuknya ditetapkan dengan undang-undang dan ditandatangani oleh atau dihadapan pejabat-pejabat penguasa umum di tempat penandatanganan akta itu.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan tambahan. Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal terlebih dahulu harus terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memenuhi persyaratan, dan mengisi permohonan pendaftaran notaris sebagai profesi penunjang pasar modal dalam lampiran peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 67 /POJK.04/2017 Tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal. Untuk dapat membuat akta otentik dan melakukan kegiatan di bidang pasar modal, notaris harus didaftarkan.

Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN P secara khusus menyebutkan bahwa Notaris berwenang memberikan nasihat hukum mengenai pembuatan akta. Hal ini menunjukkan bahwa keinginan penghadap dituangkan dalam suatu akta notaris dan notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan atau nasihat hukum mengenai ketentuan hukum atas perbuatan yang dimohonkan. Pembinaan hukum ini penting agar kegiatan yang dilakukan tidak mengabaikan pengaturan hukum dan perbuatan nyata.

Di Indonesia, kewenangan notaris dapat dibagi menjadi dua kategori:

1. Kewenangan Notaris yang dituangkan dalam Akte Kenotariatan, dan
2. Undang-Undang lainnya mengatur tentang kewenangan Notaris.

Undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian antara lain mengakui adanya kewenangan notaris. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur tentang perseroan terbatas. Undang-undang ini mengatur tujuh macam akta, termasuk kewenangan notaris untuk membuatnya, yang meliputi:

1. Akta pendirian perseroan terbatas,
2. Akta perubahan anggaran dasar,
3. Akta penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan,
4. Akta pengambilalihan saham,
5. Akta peleburan,
6. Akta rapat umum pemegang saham (RUPS), dan
7. Akta pembubaran perseroan terbatas (PT).

Akta pada dasarnya dapat dipecah menjadi dua kategori:

1. akta di bawah tangan; dan
2. akta autentik

Akta di bawah tangan, disebut juga *deed under the hand* dalam bahasa Inggris dan *akte onder de hand* dalam bahasa Belanda, adalah akta yang dibuat sendiri oleh para pihak tanpa bantuan pejabat. Ada tiga jenis yang berbeda dari akta ini:

1. akta di bawah tangan di mana para pihak menandatangani kontrak tanpa bantuan pejabat umum dan membayar bea materai;
2. akta di bawah tangan yang diiktakan dan didaftarkan (*waarmerken*);
3. akta di bawah tangan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan disahkan.

Akuntan Publik sebagai penunjang panggilan pasar modal diatur dalam Peraturan Nomor 8 Tahun 1995 tentang Bidang Usaha Modal dalam Pasal 64 ayat (1), dan untuk dapat melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal terlebih dahulu harus didaftarkan pada Bapepam. Notaris adalah pejabat umum yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan berwenang untuk membuat akta otentik. Demikian penjelasan dalam UUPM Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 64 ayat (1), huruf d. Notaris wajib menyiapkan, membuat, dan menyusun dokumen tentang berbagai hubungan hukum yang terjadi antara berbagai pihak sebelum, selama, dan setelah penawaran umum. Oleh karena itu, Notaris memiliki peran penting dalam kegiatan pasar modal. Berikut adalah akta notaris:

1. Akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang persetujuan pemegang saham pendiri atas rencana penawaran umum perseroan;
2. perubahan anggaran dasar perusahaan dengan persetujuan Kementerian Kehakiman;
3. perjanjian yang disahkan antara penerbit dan agen penjual saham;
4. kesepakatan antara emiten dengan Biro Administrasi Efek tentang pendaftaran pemegang saham;
5. perjanjian antara emiten dengan perusahaan yang mencetak saham dan prospektus (*securities printing*);
6. perjanjian amandemen (*addendum*) penjamin emisi yang berkaitan dengan harga dan nilai saham penjamin emisi.

UU Pasar Modal No. 65 menyatakan: Menurut Pasal 8 tahun 1995, pendaftaran profesi yang mendukung pasar modal batal demi hukum jika izin profesi yang bersangkutan dicabut oleh instansi

yang berwenang. Namun, kecuali jasa yang diberikan menjadi alasan pembatalan pendaftaran atau pencabutan izin profesi, maka jasa yang diberikan tidak termasuk dalam pembatalan, meskipun pendaftaran profesi dibatalkan.

Perusahaan yang menggunakan profesi ini dapat diwajibkan untuk menunjukkan profesi penunjang pasar modal lainnya agar BAPEPAM dapat melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap usaha tersebut apabila Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) menetapkan bahwa jasa yang diberikan sudah tidak berlaku. Karena memiliki wewenang atau authority yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, notaris memegang jabatan dan peranan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kewenangan notaris disebut juga de notary autoriteit dalam bahasa Belanda dan the notary of authority dalam bahasa Inggris adalah kekuasaan yang dimiliki oleh seorang notaris. Wewenang notaris terdiri dari dua suku kata, yang meliputi:

1. kewenangan; dan
2. notaris.

Kewenangan Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Pembuatan Akta berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)

Dalam sistem hukum Indonesia, notaris tidak hanya berwenang membuat akta otentik tetapi juga memiliki kewenangan lain. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengatur tentang kewenangan notaris. Kewenangan itu, khusus untuk:

1. akta autentik;
2. menjamin kepastian tanggal pembuatan akta;
3. menyimpan akta;
4. memberikan grosse;
5. salinan akta;
6. kutipan akta.
7. legalisasi akta di bawah tangan;
8. waarmeding;
9. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan;
10. pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
11. penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
12. akta pertanahan;
13. akta risalah lelang; atau
14. kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Akta notaris dianggap sebagai akta otentik. Akta otentik yang diaktakan yang memuat:

1. semua perbuatan;
2. perjanjian;
3. penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan; dan/atau

4. yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik.

Akta yang disebut "*handeling*" dalam bahasa Belanda dan "*action*" dalam bahasa Inggris, merujuk pada apa yang akan dilakukan oleh subjek hukum atau penghadap kepada notaris. Pengertian perbuatan dalam ketentuan ini tidak hanya meliputi perbuatan hukum, tetapi juga perbuatan nonhukum. Hak dan tanggung jawab para pihak ditentukan oleh tindakan hukum.

Akta kesepahaman adalah surat-surat bukti yang memuat hubungan yang sah antara satu subjek dengan satu subjek lain yang sah, di mana satu subjek yang sah memenuhi syarat untuk suatu prestasi, sedangkan pihak lain berkewajiban untuk menyelesaikan prestasi itu. sehingga para pihak mendapat kepastian hukum yang diberikan dengan adanya akta tersebut. Kepastian ini meliputi kepastian mengenai para pihak, objek, serta hak dan kewajibannya.

Istilah "*the determination of which are required by laws and regulations*" penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan" digunakan dalam bahasa Inggris, sedangkan "*bepaling van die vereist zijn door de wetgeving*" digunakan dalam bahasa Belanda untuk merujuk pada proses atau cara penentuan. Secara khusus menetapkan, atau menjamin, berbagai keputusan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam bahasa Belanda, istilah "*verzekeren*" berarti "jaminan" yang menjamin ketepatan atau kepastian tanggal akta. Tanggal yang tertulis dalam akta adalah tanggal kedua akta dibuat. Istilah Inggris menyimpan akta adalah *save the deed*, sedangkan istilah Belanda *besparen daad* berarti meletakkan akta di tempat yang aman agar tidak rusak.

Di Indonesia, kewenangan notaris dapat dibagi menjadi dua kategori:

1. Kewenangan Notaris yang dituangkan dalam Akte Kenotariatan, dan
2. Undang-Undang lainnya mengatur tentang kewenangan Notaris.

Undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian antara lain mengakui adanya kewenangan notaris. Akuntan Publik sebagai penunjang panggilan pasar modal diatur dalam Peraturan Nomor 8 Tahun 1995 tentang Bidang Usaha Modal dalam Pasal 64 ayat (1), dan untuk dapat melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal terlebih dahulu harus didaftarkan pada Bapepam.

Notaris adalah pejabat umum yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan berwenang untuk membuat akta otentik. Demikian penjelasan dalam UUPM Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 64 ayat (1), huruf d. Notaris wajib menyiapkan, membuat, dan menyusun dokumen tentang berbagai hubungan hukum yang terjadi antara berbagai pihak sebelum, selama, dan setelah penawaran umum. Oleh karena itu, Notaris memiliki peran penting dalam kegiatan pasar modal. Berikut adalah akta notaris:

1. Akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang persetujuan pemegang saham pendiri atas rencana penawaran umum perseroan;
2. perubahan anggaran dasar perusahaan dengan persetujuan Kementerian Kehakiman;
3. perjanjian yang disahkan antara penerbit dan agen penjual saham;
4. kesepakatan antara emiten dengan Biro Administrasi Efek tentang pendaftaran pemegang saham;

5. perjanjian antara emiten dengan perusahaan yang mencetak saham dan prospektus (*securities printing*);
6. perjanjian amandemen (*addendum*) penjamin emisi yang berkaitan dengan harga dan nilai saham penjamin emisi.

UU Pasar Modal No. 65 menyatakan: Menurut Pasal 8 tahun 1995, pendaftaran profesi yang mendukung pasar modal batal demi hukum jika izin profesi yang bersangkutan dicabut oleh instansi yang berwenang. Namun, kecuali jasa yang diberikan menjadi alasan pembatalan pendaftaran atau pencabutan izin profesi, maka jasa yang diberikan tidak termasuk dalam pembatalan, meskipun pendaftaran profesi dibatalkan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan kesimpulan dapat ditarik kesimpulan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan tambahan. Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal terlebih dahulu harus terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memenuhi persyaratan, dan mengisi permohonan pendaftaran notaris sebagai profesi penunjang pasar modal dalam lampiran peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 67/POJK.04/2017 Tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal. Untuk dapat membuat akta otentik dan melakukan kegiatan di bidang pasar modal, notaris harus didaftarkan. Pasal 15 ayat (2) huruf e UUUJN P secara khusus menyebutkan bahwa Notaris berwenang memberikan nasihat hukum mengenai pembuatan akta. Hal ini menunjukkan bahwa keinginan penghadap dituangkan dalam suatu akta notaris dan notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan atau nasihat hukum mengenai ketentuan hukum atas perbuatan yang dimohonkan. Pembinaan hukum ini penting agar kegiatan yang dilakukan tidak mengabaikan pengaturan hukum dan perbuatan nyata. Kewenangan notaris dalam memberikan penyuluhan hukum pembuatan akta berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) adalah Pasal 15 ayat (2) huruf e UUUJN P secara khusus menyebutkan bahwa Notaris berwenang memberikan nasihat hukum mengenai pembuatan akta. Hal ini menunjukkan bahwa keinginan penghadap dituangkan dalam suatu akta notaris dan notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan atau nasihat hukum mengenai ketentuan hukum atas perbuatan yang dimohonkan. Pembinaan hukum ini penting agar kegiatan yang dilakukan tidak mengabaikan pengaturan hukum dan perbuatan nyata.

REFERENSI

- Cindarputera, R., & Putra, M. F. M. (2022). Kewenangan Notaris Dalam Persoalan penyuluhan Hukum Dan Mediasi. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(3).
- Herlina, E. (2018). Implementasi Prinsip Transparansi Sebagai Salah Satu Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam Pasar Modal. *JURNAL PEMULIAAN HUKUM*, 1(1).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 67/POJK.04/2017 Tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal.

Setiadewi, K., & Wijaya, I. M. H. (2020). Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 126-134.

Sinaga, N. A. (2018). Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 8(2).

Taqiyuddin Kadir, S. H. (2022). *Gugatan Derivatif: Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas*. Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.